



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes, perlu disesuaikan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 117 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Sub Koordinator adalah Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/Sekretaris/Koordinator dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya dan ditunjuk oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB II
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan;

- d. bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran;
 - e. UPT; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas melaksanakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai uraian tugas :
- a. merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan kebijakan di bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

- c. melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
- d. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- e. menyelenggarakan kebijakan di bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran Pemerintah Daerah, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
- f. menyelenggarakan kebijakan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran Pemerintah Daerah, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
- g. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian.
- h. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- i. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertugas :

- a. perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan;
- b. pengkoordinasian;
- c. pemantauan;
- d. evaluasi; dan
- e. pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Uraian Tugas Sekretariat, meliputi :

- a. menyusun konsep program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;

- c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. mengonsep program kerja dan laporan dinas dengan mengkoordinasikan penyusunan program dan laporan dari bidang-bidang;
- e. menyelia pengelolaan keuangan dinas dengan cara mengarahkan pelaksanaan teknis penyusunan anggaran, belanja umum dan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan;
- f. menyusun konsep bidang keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan hukum;
- g. menyelenggarakan ketatausahaan dinas dengan menyelia pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan pelayanan pimpinan;
- h. menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas dengan mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana prasarana dan pengadaan serta penghapusan barang inventaris;
- i. menyelia pengelolaan administrasi kepegawaian dinas untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia;
- j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. subbagian program dan keuangan; dan
 - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Pasal 10

- (1) Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di bidang program dan keuangan.

- (2) Uraian tugas subbagian program dan keuangan, meliputi :
 - a. menyiapkan bahan program kerja bidang program dan keuangan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
 - c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - d. melaksanakan kegiatan perencanaan dengan mengelola bahan penyusunan rencana kerja dinas secara periodik;
 - e. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas;
 - f. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dinas dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dinas;
 - h. melaksanakan perencanaan keuangan Dinas dengan mengelola bahan penyusunan rencana anggaran, belanja umum dan kegiatan;
 - i. mengkoordinasikan pengelolaan keuangan Dinas meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

Pasal 11

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas subbagian umum dan kepegawaian, meliputi :
 - a. menyiapkan bahan program kerja bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;

- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola surat masuk, surat keluar, penataan arsip dan dokumen, legalisasi surat, Sistem Informasi Manajemen dinas;
- e. menyiapkan bahan keorganisasian, kehumasan dan hukum dinas dengan menyiapkan bahan analisis dan kajian yang diperlukan dinas;
- f. melaksanakan pengelolaan rumah tangga dinas dengan menyelia administrasi barang inventaris/aset, barang pakai habis, pemeliharaan sarana prasarana kantor, pengadaan dan penghapusan barang inventaris/aset;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi presensi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, gaji dan tunjangan, pendidikan, kesejahteraan, disiplin, promosi, mutasi dan penatausahaan pegawai;
- h. melaksanakan pengelolaan pensiun, cuti, daftar nominatif pegawai dan daftar urut kepangkatan, penilaian prestasi kerja dan urusan kepegawaian lain;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pimpinan dalam dan luar kantor dengan menyiapkan administrasi dan sarana prasarana yang diperlukan Kepala Dinas;
- j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan dan Penaatan Hukum Lingkungan

Pasal 12

- (1) Bidang perencanaan dan penaatan hukum lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pelaksana di bidang perencanaan dan penaatan hukum lingkungan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 13

Bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan, melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penataan hukum lingkungan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, supervisi serta pengendalian perencanaan dan penataan hukum lingkungan;
 - d. pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (1) Uraian tugas bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan, meliputi:
- a. merumuskan konsep program kerja bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
 - c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - d. menyusun kebijakan di bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
 - f. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, supervisi, serta pengendalian penataan dan pendayagunaan dalam perencanaan dan penataan hukum lingkungan dalam rangka pencapaian sasaran kerja di bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan;

- g. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan PPLH, kebijakan dan konservasi pemanfaatan berkelanjutan serta pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, penyediaan dan pengelolaan taman/ruang terbuka hijau, pemeliharaan makam sesuai aturan yang berlaku;
- h. mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan pada bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan fasilitasi, supervisi serta pengendalian penataan dan pendayagunaan dalam perencanaan dan penataan hukum lingkungan serta menyiapkan alternatif pemecahannya;
- j. mengendalikan pelaksanaan di bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan agar sesuai dengan sasaran kerja;
- k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, yang terbagi atas tiga Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator perencanaan dan kajian lingkungan hidup;
 - b. Sub Koordinator penataan lingkungan hidup; dan
 - c. Sub Koordinator pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan.
- (4) Tugas tiap-tiap Sub Koordinator sebagaimana pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 16

- (1) Bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 17

Bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran melaksanakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan secara terpadu;
 - b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, supervisi, serta pengendalian bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran;
 - d. pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- f. Uraian tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran sebagai berikut :
- g. merumuskan konsep program kerja bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- i. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- j. menyusun kebijakan dibidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- k. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, supervisi, serta pengendalian penataan dan pendayagunaan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran dalam rangka pencapaian sasaran kerja bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran sesuai aturan yang berlaku;
- l. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai aturan yang berlaku;
- m. mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan pada bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- n. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran serta menyiapkan alternatif pemecahannya;
- o. mengendalikan pelaksanaan dibidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran agar sesuai dengan sasaran kerja;
- p. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- q. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, yang terbagi atas dua Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun; dan
 - b. Sub Koordinator pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran.
- (4) Tugas tiap-tiap Sub Koordinator sebagaimana pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

UPT

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional serta pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 23

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.
- (3) Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (9) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 24

- (1) Pada unit kerja fungsional yang disetarakan ditunjuk Sub Koordinator untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan;
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas tambahan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional yang ditunjuk;
- (3) Sub Koordinator bertugas membantu Sekretaris/Kepala Bidang/Koordinator dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pemberian tugas tambahan kepada Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Pemberian tugas tambahan kepada Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator Hasil Penyetaraan Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 26

- (1) Untuk kebutuhan dan/atau kepentingan organisasi, Kepala Dinas dapat melakukan perpindahan penunjukan Sub Koordinator dalam internal Dinas dengan ketentuan dalam satu jenis jabatan fungsional yang sama setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.

- (2) Penunjukan sebagai Sub Koordinator lintas Perangkat Daerah dalam satu jenis jabatan fungsional yang sama dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Sub Koordinator, Kepala Dinas dapat menunjuk sub Koordinator dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang memenuhi syarat setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal penunjukan Sub Koordinator sebagai mana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Dinas melaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Penunjukan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai Sub Koordinator dilakukan dalam hal belum tersedia Jabatan Fungsional yang sesuai.
- (4) Kepala Dinas melaporkan rencana pemberian tugas tambahan dilingkungannya kepada Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian, untuk menghindari kekosongan karena tidak ada Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana yang memenuhi syarat sekaligus untuk penyesuaian tambahan perbaikan penghasilan yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 117 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 117 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 117) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 2 Desember 2022
BUPATI BREBES,

TTD

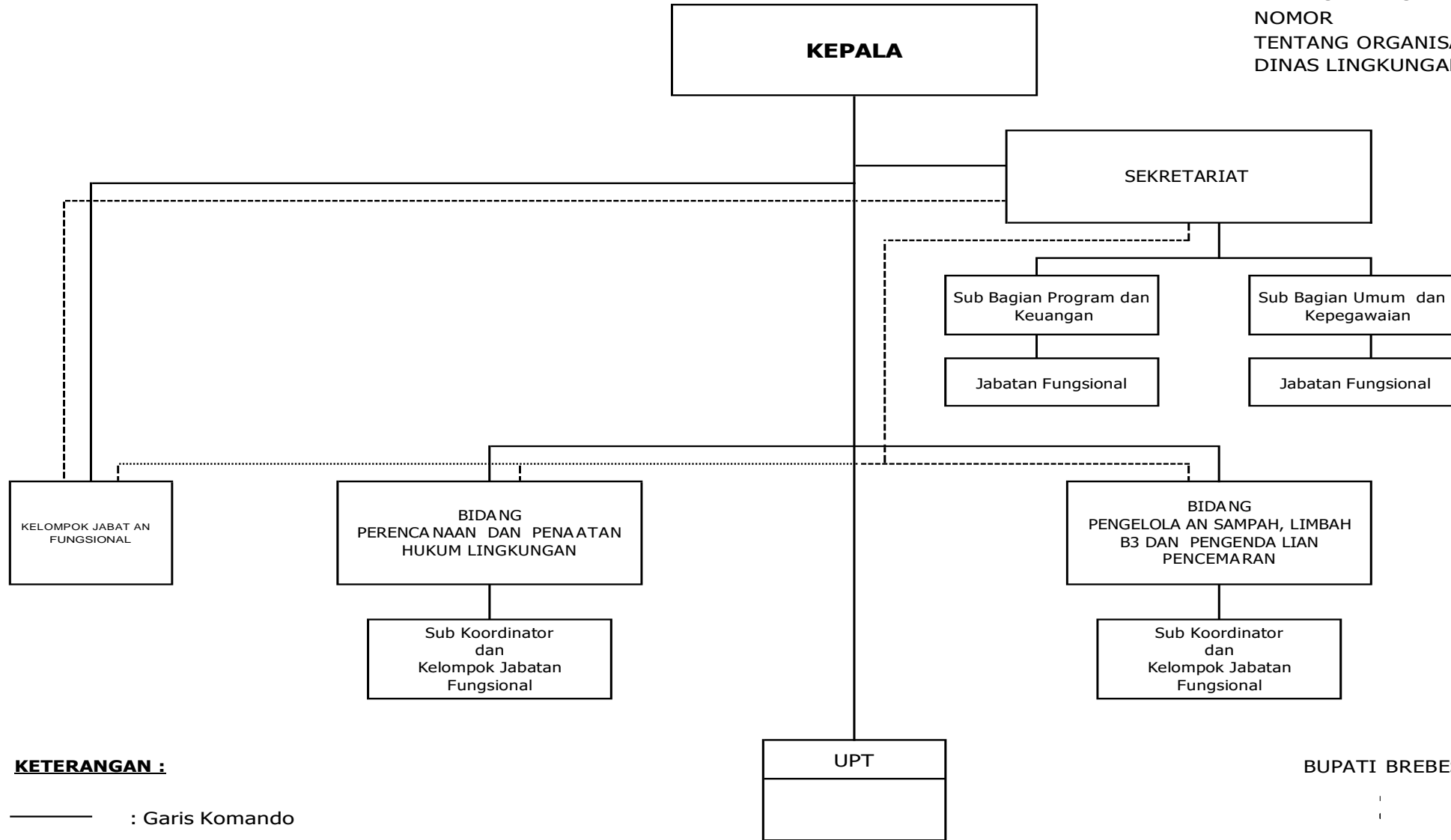
IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 2 DESEMBER 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 96

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



KETERANGAN :

- : Garis Komando
- : Garis Koordinasi

BUPATI BREBES,
:
IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- A. Bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan, terdiri dari:
- (1) Sub Koordinator perencanaan dan kajian lingkungan hidup bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan kajian lingkungan hidup, meliputi:
1. menyiapkan bahan program kerja seksi perencanaan dan kajian lingkungan hidup sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 2. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
 3. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 4. melaksanakan pengelolaan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, fasilitasi, supervisi serta pengendalian dalam perencanaan dan kajian lingkungan hidup sesuai aturan yang berlaku;
 5. melaksanakan penyiapan data sebagai bahan pembinaan, fasilitasi, supervisi dan pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup), penyusunan status dan indeks kualitas lingkungan hidup, penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH), penilaian dan penyusunan tim dokumen lingkungan (Amdal dan UKL-UPL) sesuai aturan yang berlaku;
 6. melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dan pembinaan dalam pelaksanaan KLHS sesuai aturan yang berlaku;

7. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan dan kajian lingkungan hidup serta menyiapkan alternatif pemecahannya;
 8. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas masing-masing pada unit kerja;
 9. mengontrol pelaksanaan kegiatan dan anggaran seksi perencanaan dan kajian lingkungan hidup;
 10. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 11. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 13. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.
- (2) Sub Koordinator penataan lingkungan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penataan lingkungan hidup, meliputi:
1. menyiapkan bahan program kerja seksi penataan lingkungan hidup sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 2. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
 3. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 4. mengonsep kegiatan seksi penataan lingkungan hidup untuk mencapai sasaran yang ditentukan;
 5. melaksanakan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, meliputi sosialisasi tata cara pengaduan, fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penelaahan dan verifikasi atas pengaduan, rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 6. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 7. melaksanakan pengelolaan laboratorium lingkungan;
 8. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan sesuai aturan yang berlaku;

9. melaksanakan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 10. melaksanakan pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan dan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 11. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
 12. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai aturan yang berlaku;
 13. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan penataan lingkungan hidup serta menyiapkan alternatif pemecahannya;
 14. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas masing-masing pada unit kerja;
 15. mengontrol pelaksanaan kegiatan dan anggaran seksi penataan lingkungan hidup;
 16. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 17. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 18. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 19. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.
- (3) Sub Koordinator pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, meliputi:
1. menyiapkan bahan program kerja seksi pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 2. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
 3. mendistribusikan tugas dan menyalah tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 4. mengonsep kegiatan seksi pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup untuk mencapai sasaran yang ditentukan;

5. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai aturan yang berlaku;
6. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan, fasilitasi, supervisi dan pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sesuai aturan yang berlaku;
7. melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan PPLH, kebijakan dan konservasi pemanfaatan berkelanjutan serta pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, penyediaan dan pengelolaan taman/ruang terbuka hijau, pemeliharaan makam sesuai aturan yang berlaku;
8. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta menyiapkan alternatif pemecahannya;
9. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas masing-masing pada unit kerja;
10. mengontrol pelaksanaan kegiatan dan anggaran seksi pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
11. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
12. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
14. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

B. Bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran, terdiri dari:

(1) Sub Koordinator pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun, meliputi:

1. menyiapkan bahan program kerja seksi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;

2. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
 3. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 4. melaksanakan kebijakan penanganan sampah, kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai aturan yang berlaku;
 5. melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) sesuai aturan yang berlaku;
 6. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
 7. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun dalam satu daerah kabupaten/kota sesuai aturan yang berlaku;
 8. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas masing-masing pada unit kerja;
 9. mengontrol pelaksanaan kegiatan dan anggaran seksi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
 10. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 11. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 13. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.
- (2) Sub Koordinator pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, meliputi:
1. menyiapkan bahan program kerja seksi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;

2. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
3. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
4. melaksanakan penanggulangan, pemulihan, pemantauan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi sesuai aturan yang berlaku;
5. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai aturan yang berlaku;
6. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan terkait pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku;
7. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas masing-masing pada unit kerja;
8. mengontrol pelaksanaan kegiatan dan anggaran seksi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
9. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
10. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
12. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI